Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
e-ISSN 2614-2945 Volume 12 Nomor 1, Bulan April Tahun 2025
Dikirim penulis: 04-03-2025, Diterima: 04-03-2025, Dipublikasikan: 29-04-2025
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEJAR PAKET C DI PKBM NEGERI 23 JAKARTA PUSAT

Nur Nabila Aulia[1*], Muhamad Cholifihani[2], Agung Edi Rustanto[3], Siti Mariam[4]
[1,2,3,4] Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: nurnabila898@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan non-formal, salah satunya program kesetaraan yang dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 23 Jakarta Pusat. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan program tersebut adalah masih adanya keterbatasan sumber daya serta tantangan dalam komunikasi antara pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program kesetaraan paket C dengan meninjau aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara purposive. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, penyajian, pengkodean, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah, pengelola, dan peserta didik sudah berjalan cukup baik meskipun penyampaian informasi belum sepenuhnya merata dan tepat waktu. Dari sisi sumber daya, masih terdapat kekurangan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik serta keterbatasan sarana pendukung pembelajaran. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen tinggi yang berdampak positif terhadap keberlangsungan program. Struktur birokrasi yang sederhana mendukung fleksibilitas pelaksanaan, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas manajerial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program kesetaraan paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 23 Jakarta Pusat berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya dan manajerial.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Kejar Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

ABSTRACT

Education is provided through formal, informal, and non-formal channels, one of which is the equivalency program implemented at the Public Learning Activity Center 23, Central Jakarta. Problems that arise in the implementation of this program are still limited resources and challenges in communication between related parties. This study aims to analyze the implementation of the Package C equivalency program policy by reviewing aspects of communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure. The study used a descriptive qualitative method with a purposive

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

informant selection technique. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of collection, presentation, coding, and drawing conclusions. The results show that communication between the government, administrators, and students has been running quite well, although the delivery of information is not entirely equitable and timely. In terms of resources, there is still a shortage of the number and qualifications of teaching staff and limited learning support facilities. The disposition of implementers shows a high level of concern and commitment that has a positive impact on the sustainability of the program. A simple bureaucratic structure supports flexibility in implementation, but still requires improvement in managerial capacity. The conclusion of this study is that the implementation of the package C equivalency program policy at the Public Learning Activity Center 23, Central Jakarta, is running quite well, although there are still obstacles in the resource and managerial aspects.

***Keywords**: Policy implementation, Package C pursuit, Community Learning Activity Center*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia karena menjadi pondasi utama bagi pembangunan individu, khususnya dalam membentuk pola pikir, sikap kepribadian, kemampuan berbahasa, serta kontribusi terhadap kehidupan sosial (Oktaviani, 2023). Pada hakikatnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang tertentu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program pendidikan nonformal, salah satunya Program Kejar Paket C yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini terkait dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal (Rajaloa, 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), klasifikasi usia sekolah di Indonesia terdiri dari PAUD 0–6 tahun, SD 7–12 tahun, SMP 13–15 tahun, SMA 16–18 tahun, dan pendidikan tinggi 19 tahun ke atas. Minimnya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi persoalan signifikan, dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, maupun rendahnya minat terhadap pendidikan (Utaminingsih, 2021). Tingginya jumlah anak putus sekolah juga menjadi masalah serius. Data Kemendikbud (2024) mencatat 45.950 siswa putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta dari jenjang SD hingga SMA, kondisi yang berpotensi menghambat daya saing bangsa di tengah tuntutan globalisasi dan persaingan keterampilan tenaga kerja.

Hadirnya pendidikan nonformal seperti PKBM dengan program kesetaraan berperan penting dalam menanggulangi angka putus sekolah. Program ini dirancang untuk mengurangi jumlah peserta didik yang tidak menyelesaikan

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

pendidikan formal, memberikan alternatif pendidikan yang fleksibel, serta menjamin akses penyelesaian pendidikan yang berkualitas (Lidya, 2024). PKBM sebagai lembaga berbasis masyarakat menyelenggarakan pembelajaran yang menyesuaikan kondisi serta kebutuhan peserta didik, sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat marginal yang terhambat faktor ekonomi maupun sosial.

Urgensi implementasi program ini semakin tinggi di wilayah urban seperti Jakarta Pusat, yang dihadapkan pada kesenjangan pendidikan, mobilitas penduduk, dan keterbatasan ekonomi. PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat, misalnya, mencatat jumlah peserta Kejar Paket C yang fluktuatif: 107 siswa (2021), 112 siswa (2022), 111 siswa (2023), 114 siswa (2024), dan 103 siswa (2025). Namun, pelaksanaannya sering tidak optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi antar pelaksana, rendahnya partisipasi warga belajar, hingga birokrasi yang kurang mendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup ditopang oleh regulasi, tetapi sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan.

Dalam konteks implementasi kebijakan, teori Edward III menawarkan kerangka analisis komprehensif dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkap bagaimana keempat aspek tersebut berinteraksi dalam pelaksanaan Program Kejar Paket C. Penelitian ini sekaligus mengembangkan riset sebelumnya oleh Seputra (2024) terkait implementasi Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian tersebut menunjukkan faktor pendukung internal berupa kompetensi sumber daya manusia, faktor eksternal berupa regulasi, serta kendala internal dan eksternal seperti pengajar yang kurang disiplin dan keterlambatan pencairan dana. State of the art penelitian ini adalah menyoroti konteks perkotaan, berbeda dengan penelitian Seputra (2024) yang berfokus pada daerah rural, sehingga diharapkan memberikan perspektif baru mengenai dinamika implementasi program di wilayah urban.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan Program Kejar Paket C berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Program Kejar Paket C berdasarkan keempat aspek tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan, pengelola PKBM, dan pemangku kepentingan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka, sesuai dengan ciri penerapan metode kualitatif (Mariam, 2016). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan Program Kejar Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat sekaligus memahami fenomena implementasi kebijakan secara mendalam

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

berdasarkan realitas di lapangan. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Haven & Grootel (2019:232) bahwa riset kualitatif sering dipergunakan dalam situasi alamiah sebagai sumber informasi, baik melalui data lisan, tulisan, maupun rekaman perilaku. Lebih lanjut, penelitian deskriptif kualitatif kerap dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman individu terhadap suatu fenomena (Fitra, 2024).

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat pada Januari hingga Maret 2025 dengan melibatkan beberapa informan yang mewakili aktor penting dalam implementasi kebijakan. Informan tersebut terdiri dari 1 orang Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat sebagai pengawas dan pembina kebijakan, 1 orang Kepala PKBM sebagai penanggung jawab program, 3 tenaga pendidik sebagai pelaksana teknis, dan 3 siswa sebagai penerima manfaat. Kriteria pemilihan informan ditetapkan berdasarkan perannya masing-masing. Suku Dinas Pendidikan berperan dalam pengawasan pendidikan nonformal dan kesetaraan, Kepala PKBM sebagai pengambil kebijakan utama memiliki pengalaman minimal 1 tahun, tenaga pendidik merupakan pelaksana pembelajaran dengan pengalaman minimal 1 tahun serta pernah mengikuti pelatihan program, sementara siswa dipilih dengan kriteria aktif minimal 1 semester dan bersedia memberikan pandangan terkait keberlangsungan program. Dengan kriteria tersebut, informan penelitian ini dinilai mampu memberikan gambaran komprehensif terkait implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan informan benar-benar relevan dengan fokus penelitian (Febriana, 2023). Data yang diperoleh terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran, serta dokumentasi internal PKBM berupa agenda kegiatan, catatan rapat, maupun laporan program. Data ini dipandang penting karena memberikan gambaran konkret mengenai implementasi kebijakan. Sementara itu, data sekunder berupa regulasi, pedoman teknis, SK pelaksanaan, Juklak/Juknis, serta literatur atau penelitian terdahulu terkait kebijakan pendidikan nonformal (Wicaksana, 2024). Dengan kombinasi keduanya, penelitian memperoleh perspektif ganda, baik dari realitas di lapangan maupun dari dasar normatif dan teoritis.

Analisis data dilakukan melalui lima tahap yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data dengan memilih informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur berdasarkan tema komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana ditekankan dalam teori Edward III. Setelah itu dilakukan proses koding dan kategorisasi, yaitu memberi label pada data untuk menemukan pola tertentu. Analisis kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan temuan-temuan tersebut ke dalam kerangka Edward III untuk

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

melihat hubungan antar variabel. Tahap akhir berupa interpretasi dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan lapangan sekaligus teori. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai faktor pendukung maupun hambatan implementasi kebijakan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini mengacu pada uji validitas dan objektivitas sebagaimana disampaikan Yin (2018). Teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Fusch, 2018). Triangulasi dilakukan baik antar sumber maupun antar metode, misalnya dengan mencocokkan keterangan dari wawancara dengan pengamatan langsung maupun dengan dokumen resmi PKBM seperti RPP dan laporan kegiatan. Dengan pendekatan ini, temuan penelitian diharapkan lebih akurat, minim bias, dan benar-benar mencerminkan realitas implementasi kebijakan Program Kejar Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Program Paket C

Program kejar paket C ialah jenis pendidikan non-formal yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pendidikan masyarakat, salah satunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Negeri 23 Jakarta Pusat. Tujuan Program kejar paket C adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal di SMA atau SMK. Selain itu, program ini dapat membantu mereka yang ingin memperoleh ijazah setara SMA untuk meningkatkan kesempatan kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Kejar Paket C melibatkan banyak orang, termasuk dinas pendidikan, kepala PKBM, tenaga pendidik, dan siswa yang terdaftar. Dinas pendidikan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program, sementara PKBM bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan belajar mengajar secara langsung. Para pendidik bertanggung jawab untuk menyediakan bahan pelajaran dan membantu siswa menyelesaikan program. Sebaliknya, siswa program ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, hingga remaja putus sekolah yang ingin lanjut sekolah.

Program ini akan berhasil meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya. Struktur birokrasi kelembagaan yang mengatur program, komunikasi antara pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, motivasi dan komitmen tenaga pendidik dan siswa adalah beberapa dari faktor-faktor tersebut. Komunikasi yang efektif antara lembaga pendidikan dan PKBM memastikan bahwa kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan tepat sasaran. Selain itu, kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang mencukupi dari anggaran, guru, dan fasilitas belajar.

Selain faktor internal yang berpengaruh, sistem birokrasi pemerintah dan peraturannya juga sangat mempengaruhi jalannya program kejar paket C. Proses administrasi yang terlalu kompleks atau peraturan yang tidak fleksibel dapat menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik diperlukan antara PKBM dan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Oleh karena itu, masalah dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat yang mempertimbangkan kebutuhan nyata peserta program.

Terkait implementasi kebijakan Program Kejar Paket C melalui pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM, sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel utama menurut teori Edward III, dan masing masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Variabel-variabel tersebut adalah : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut ini. Adapun implementasi memiliki kaitan erat dengan kualitas pelayanan karena implementasi adalah kebijakan atau standar pelayanan diwujudkan dalam praktik. Kualitas pelayanan merupakan level keunggulan dan pengendalian yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Kualitas pelayanan tidak ditinjau dari sudut pandang pelaku bisnis atau penyedia layanan namun ditinjau dari persepsi pelaku usaha yang merasakan produk. Setiap bisnis yang berjalan pasti memiliki tujuan bagaimana pelaku usaha harus merasa puas dan nyaman atas pelayanan yang diterima. Setiap pelaku bisnis harus selalu memperhatikan apa yang diinginkan oleh konsumen atau calon konsumennya (Rustanto, 2022).

4.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam implementasi kebijakan menurut teori Edward III. Dalam konteks Program Kejar Paket C di PKBM, komunikasi mencakup efektivitas penyampaian informasi, prosedur komunikasi, dan berbagai kendala yang muncul dalam proses pertukaran informasi antara pemangku kepentingan.

a. Efektivitas Komunikasi

Hasil wawancara menunjukan pelaksanaan PKBM secara umum telah mendapatkan informasi mengenai kebijakan melalui berbagai saluran. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa pihak suku dinas pendidikan sering memanggil langsung pengelola PKBM untuk pengarahan. Selain itu, ada pula media komunikasi seperti grup online yang digunakan untuk menyampaikan perubahan kebijakan secara cepat dan informal.

Kutipan wawancara :

"Komunikasi itu ada berbagai cara pengurus PKBM langsung dipanggil ke Suku Dinas Pendidikan untuk pengarahan".

"Setiap perubahan kebijakan disampaikan melalui Informasi yang diterima ada group online dari Suku Dinas Pendidikan".

b. Prosedur Penyampaian

Prosedur penyampaian komunikasi di PKBM dilakukan melalui berbagai metode, seperti sosialisasi tatap muka, webinar, hingga media sosial. PKBM juga berperan sebagai jembatan yang meneruskan informasi dari pemerintah ke peserta program.

Kutipan wawancara :

"Kami menetapkan prosedur sosialisasi melalui tatap muka, media sosial dan webinar".

"Ada mekanisme formal jalur komunikasi dua arah dimana masyarakat dan PKBM dapat memberikan masukan atau pertanyaan terkait prosedur".

Hal ini menunjukan bahwa pelaksana sudah memiliki mekanisme

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
e-ISSN 2614-2945 Volume 12 Nomor 1, Bulan April Tahun 2025
Dikirim penulis: 04-03-2025, Diterima: 04-03-2025, Dipublikasikan: 29-04-2025
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

komunikasi yang cukup variatif dan mengikuti perkembangan teknologi".

c. Kendala Komunikasi

Meskipun telah tersedia berbagai saluran dan prosedur, implementasi komunikasi tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa informan mengeluhkan adanya miskomunikasi, perbedaan persepsi terhadap peraturan, dan koordinasi yang kurang antara PKBM dan Dinas Pendidikan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan dan kebingungan dalam penerapan peraturan.

Kutipan wawancara :

"Koordinasi antara Dinas Pendidikan masih perlu diperbaiki untuk mempercepat distribusi informasi".

"Terkadang penyampaian komunikasi terkendala karena perbedaan pemahaman karena kemampuan orang menerima komunikasi itu berbeda-beda".

Hal ini menunjukan perlunya ada perbaikan dalam struktur dan frekuensi komunikasi antar lembaga.

4.3 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam efektivitas implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Dalam konteks PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat, sumber daya mencakup anggaran, fasilitas, dan tenaga pendidik yang kesemuanya memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran Program Kejar Paket C.

a. Anggaran

PKBM Negeri menunjukkan manajemen anggaran yang relatif baik dan transparan, terutama dalam hal pembayaran honorarium guru. Hal ini mencerminkan tata kelola yang sehat serta keterbukaan informasi kepada tenaga pendidik.

Kutipan wawancara :

"PKBM Negeri 23 memiliki anggaran yang cukup dari pemerintah adanya dana BOS dan dari APBD"'

"Terdiri dari 8 guru yang anggaran untuk guru di PKBM Negeri termasuk tutor, biasanya berasal dari sumber dana yang sama dengan anggaran Pendidikan formal, seperti biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) dan insetis guru non ASN".

Selain itu, PKBM Negeri 23 juga dilaporkan memiliki materi dan fasilitas yang cukup memadai, yang mengindikasikan bahwa anggaran digunakan tidak hanya untuk operasional tenaga pendidik, tetapi juga untuk mendukung proses pembelajaran.

Kutipan wawancara :

"PKBM Negeri 23 memiliki fasilitas dan materi yang cukup memadai".

b. Fasilitas

Secara umum, fasilitas di PKBM Negeri cukup lengkap dan mendukung proses belajar mengajar. Beberapa ruang praktik seperti ruang TIK, tata busana, tata boga, dan perpustakaan sudah tersedia, yang mencerminkan upaya lembaga dalam memenuhi standar sarana pendidikan nonformal.

Kutipan wawancara :

"PKBM memiliki gedung ruang kelas yang memadai".

"Kami memiliki ruang TIK, ruang tata busana, ruang perpustakaan dan ruang tata boga".

Namun, masih terdapat kekurangan dalam fasilitas praktikum khususnya di bidang sains, yang bisa menghambat pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh.

Kutipan wawancara :

"Fasilitas seperti ruang praktikum

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

IPA masih belum tersedia".

c. Tenaga pendidik

Dari sisi kualitas SDM, PKBM telah melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi guru, yang membantu meningkatkan kompetensi mengajar. Hal ini penting mengingat tenaga pengajar di PKBM sering kali berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam.

Kutipan wawancara :

"Menyediakan pelatihan dan sertifikasi guru".

"Tentu saya rasa cukup baik ya karena pelatihan bermanfaat".

Namun, dari sisi beban kerja, guru masih harus mengajar lintas kelas dan lintas bahan ajar, yang berisiko mengurangi efektivitas pembelajaran karena keterbatasan waktu dan fokus.

"Guru di PKBM harus mengajar lintas kelas dan lintas bahan ajar".

4.4 Disposisi

Dalam teori Edward III, disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Disposisi ini mencakup komitmen kepala lembaga, motivasi tenaga pendidik, dan motivasi peserta didik, yang semuanya merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nonformal seperti Program Kejar Paket C.

a. Komitmen Kepala PKBM

Kepala PKBM memainkan peran penting dalam memastikan program berjalan dengan baik. Komitmen ini terlihat melalui keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Tidak hanya menjalankan peran administratif, kepala PKBM juga aktif dalam meningkatkan mutu program, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas tenaga pengajar.

Kutipan wawancara :

"Kepala PKBM bertanggung jawab memastikan visi dan misi program berjalan".

"Kepala dan pengelola program secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program".

"Selalu ada upaya peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar oleh PKBM

b. Motivasi Guru

Guru PKBM menunjukkan motivasi dan semangat tinggi dalam mengajar, meskipun di tengah keterbatasan fasilitas dan insentif. Mereka menyadari bahwa program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Kutipan wawancara :

"Guru merasa bahwa program ini memberikan manfaat untuk orang banyak".

"Selalu memberikan yang terbaik untuk siswa PKBM".

"Memiliki komitmen memberikan ilmu".

c. Motivasi Siswa

Peserta Program Kejar Paket C memiliki motivasi yang jelas dan realistis. Mayoritas mengikuti program untuk mendapatkan ijazah sebagai syarat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Selain itu, beberapa peserta juga ingin meningkatkan keterampilan agar lebih percaya diri dalam bersaing.

Kutipan wawancara :

"Saya ingin mendapatkan ijazah agar bisa bekerja atau melanjutkan kuliah".

"Mendapatkan ijazah untuk karier".

"Mempunyai ijazah untuk meningkatkan keterampilan".

4.5 Struktur Birokrasi

Dalam teori Edward III, struktur

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

birokrasi mencakup bagaimana sistem organisasi, prosedur, dan aturan mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan efisien mendukung kelancaran implementasi, sedangkan birokrasi yang kaku dan tidak responsif dapat menjadi penghambat.

a. Prosedur Administratif

Beberapa kutipan wawancara menunjukkan bahwa PKBM memiliki struktur organisasi dan sistem administrasi yang jelas, sistematis, dan berjalan efektif. Prosedur ini dapat membantu dalam menertibkan operasional lembaga, mempercepat proses pelaporan, dan menjaga akuntabilitas.

Kutipan wawancara :

"PKBM memiliki prosedur administrasi yang jelas dan sistematis".

"Sistem dan struktur PKBM berjalan efektif dan efisien".

"Menetertibkan dan memberikan kelancaran program".

Struktur birokrasi yang rapi memungkinkan lembaga menjalankan kebijakan dengan tertib dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar bagian.

b.Hambatan Birokrasi

Meski struktur internal PKBM cukup tertib, masih terdapat hambatan birokrasi dari sisi hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan lembaga pelaksana (PKBM). Beberapa regulasi nasional dinilai tidak relevan dengan kondisi lokal, sehingga menyulitkan pelaksana dalam menyesuaikan kebijakan dengan konteks lapangan.

Kutipan wawancara :

"Beberapa regulasi pusat tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal".

"Perbedaan kebijakan antara pusat dan PKBM".

"Kebijakan pusat yang sering berubah tanpa kesiapan ditingkat pelaksana".

Perubahan kebijakan yang mendadak dari pusat tanpa ada pelatihan atau sosialisasi memadai akan menjadi tantangan, terutama dilevel implementasi teknis. Hal Ini memperlihatkan kurangnya sinkronisasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kejar Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat

Implementasi Program Kejar Paket C di PKBM didukung oleh komitmen kepala lembaga, motivasi pelaksana dan peserta, fasilitas dasar yang cukup, serta struktur administratif internal yang tertib. Namun, terdapat hambatan utama pada aspek komunikasi dan birokrasi lintas tingkat (pusat-daerah), serta beban kerja tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas sains.

4.6 Faktor Pendukung :

a.Komunikasi

Efektivitas komunikasi dua arah antara PKBM dan dinas pendidikan, melalui tatap muka dan grup online. Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui berbagai media (webinar, grup online, dan pertemuan langsung).

b.Sumber Daya

Tenaga pendidik tersedia sesuai tugas pokok dan fungsi, serta dilengkapi dengan pelatihan dan sertifikasi. Fasilitas fisik cukup memadai, termasuk ruang kelas, ruang TIK, tata busana, perpustakaan, dan tata boga. Anggaran dikelola secara transparan, khususnya untuk honorarium guru.

c.Disposisi

Komitmen kepala PKBM tinggi,

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Motivasi guru kuat, merasa program ini bermanfaat bagi masyarakat. Motivasi peserta tinggi, ingin mendapatkan ijazah untuk melanjutkan kuliah atau meningkatkan karir.

d.Struktur Birokrasi

Prosedur administrasi berjalan baik, sistematis, dan mendukung kelancaran pelaksanaan program.

4.7 Faktor Penghambat :

a.Komunikasi

Miskomunikasi dan perbedaan pemahaman antara pelaksana dan dinas. Koordinasi dengan dinas lambat, menyebabkan keterlambatan dalam aplikasi kebijakan.

b.Sumber Daya

Guru harus mengajar lintas kelas dan bahan ajar, akibat keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Fasilitas laboratorium IPA belum tersedia, membatasi pembelajaran praktik sains.

c.Disposisi

(Secara umum, disposisi cenderung mendukung. Tidak ditemukan hambatan serius pada aspek ini dalam data).

d. Struktur birokrasi

Kebijakan pusat sering berubah, tanpa kesiapan pelaksana. Perbedaan regulasi pusat dan kebutuhan lokal, menyebabkan kebijakan tidak kontekstual.

D. KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Kejar Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh empat aspek utama sebagaimana dijelaskan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif antara pelaksana, pendidik, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci utama agar program berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya, baik tenaga pendidik, sarana-prasarana, maupun dukungan keuangan, terbukti masih menjadi hambatan serius. Sikap dan komitmen para pihak, khususnya pengajar dan pengelola PKBM, berperan penting dalam menjaga konsistensi program. Sementara itu, dinamika struktur birokrasi kebijakan pusat yang kerap berubah tanpa kesiapan daerah memperlihatkan bahwa aspek regulasi harus lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian di wilayah perkotaan, di mana kompleksitas sosial-ekonomi, mobilitas penduduk, serta kesenjangan pendidikan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini memperkaya penerapan teori Edward III dalam konteks pendidikan nonformal di Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman baru bahwa fleksibilitas kebijakan menjadi prasyarat penting agar program kesetaraan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat perkotaan.

Implikasi keilmuan dari penelitian ini adalah kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan pendidikan, khususnya dalam menegaskan relevansi teori implementasi kebijakan Edward III di sektor pendidikan nonformal. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan disposisi pelaksana seringkali lebih menentukan daripada sekadar keberadaan aturan atau sumber daya. Hal ini memperluas wawasan akademik bahwa studi implementasi kebijakan harus mempertimbangkan dimensi sosial dan

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

budaya lokal.

Dampak praktis dari penelitian ini mencakup berbagai aspek. Dari sisi sosial dan budaya, Program Kejar Paket C berpotensi mengurangi angka putus sekolah sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai bagian dari mobilitas sosial. Dari sisi ekonomi, keberhasilan program ini dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Dari sisi politik dan hukum, temuan penelitian ini mendorong perlunya sinkronisasi regulasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal agar kebijakan lebih responsif dan tidak sekadar seragam di seluruh daerah. Sementara itu, dari sisi lingkungan kelembagaan, penelitian ini memperlihatkan bahwa PKBM sebagai lembaga berbasis masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan warga, sehingga keberadaannya harus diperkuat melalui dukungan regulasi, anggaran, dan partisipasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan, tetapi juga menawarkan masukan praktis bagi pemerintah, pengelola PKBM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan nonformal sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Andani, et al. (2023). Upaya Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Kampung Polak Penyayang Desa Masbagik Selatan. Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 08(03), 3871–3880. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/10717

Febriana, et al. (2023). Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *14*(2), 173–187. https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.407

Fitra, et al. (2024). Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Di PKBM Setia Budi Kabupaten Pati. *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, *2*(1), 153–165. https://ifrelresearch.org/index.php/garuda-widyakarya/article/view/2584

Ismiyati, et al. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Dilihat Dari Aspek Sumber Daya*. *7*, 181–195.

Lidya, et al. (2024). Program Paket Kesetaraan Upaya Mengatasi Angka Putus Sekolah. *Journal of Global and Multidisciplinary*, *2*(1), 838–844. https://journal.institercom-edu.org/index.php/multipleINSTITERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple

Mariam. (2016). Kepentingan Kebijakan Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta No. 4 Tahun 2007

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Pengendalian, Pemeliharaan Dan Peredaran Unggas) Dan Implikasinya Terhadap Usaha Pendistribusian Unggas Di Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, *4*(June), 2016. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/99/87

Mubarok, et al. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, *005*(01), 33–38. https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7

Oktaviani. (2023). Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Dengan Program Kejar Paket PKBM Di Kelurahan Pucang Sewu. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *1*(4), 335–344. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/718

Rajaloa, et al. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalan Membina Peserta Didik Yang Putus Sekolah (Studi Kasus di PKBM Mario Laha Kota Ternate Utara). *GeoCivic Jurnal*, *6*(1), 43–52. https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/geocivic/article/view/6165/3858

Rustanto, A. E. (2022). Kualitas Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha UMKM Di Pulo Gadung Jakarta Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, *8*(2), 318–326. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.70

Seputra, et al. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Paket C Melalui Pendidikan Kesetaraan Di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng*. *16*(1), 75–88.

Sudracun, S., Wati, M., & Fikri, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Puskesmas Sinar Baru Pada Tahun 2018. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, *8*(2), 368. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2738

Utaminingsih. (2021). Analisis Rendahnya Minat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Yang Lebih Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(2), 94–105. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/view/12812

Wicaksana, H. H. (2024). Deliberative Policy Analysis of Green Open Spaces in Lebak Regency Banten Province. *Journal of Governance*, *9*(1). https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.22670

Zsal Zsal, et al. (2024). Strategi PKBM Nara Kreatif dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kampung Pemulung Pondok Kopi Jakarta Timur. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, *2*(3), 100–113. https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.621

Buku.

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Fusch, et al. (2018). Denzin's Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research. *Journal of Social Change*, *10*(1), 18–32. https://doi.org/10.5590/josc.2018.10.1.02

Yin, R. K. (2018). Case Study Research And Applications. In *Case* (Vol. 53, Issue 9).

Karya Ilmiah Lepas yang dimuat pada Website.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Pendidikan Indonesia.

Kemendikbud. (2024). Data Anak Putus Sekolah Provinsi DKI Jakarta.